

**MODEL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO POLA GRAMEEN BANK
UNTUK PENGUATAN KLASTER
(di Kabupaten Brebes dan Kota Surakarta)**

Sriyanto, Wiwin Widiastuti

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Email: paksri16@yahoo.co.id

ABSTRACT

Strengthening of the cluster is affected by the factors of production, including capital. The goal is: to identify the structure of the chain of activities, capital requirements, financial institutions and role models pattern of Microfinance Institution Grameen for strengthening clusters. Research sites in coastal areas (clusters of seaweed in Brebes) and the highlands (batik cluster in Surakarta). The results, that: Characteristics of clusters varies influent by local socio cultural factors. Structure activity of clusters is different. Capital requirements are relatively small, less than Rp 5 million as much as 80,00 %. Non-formal financial institutions nearby PNPM Mandiri. Influencing factors : management, solidarity, and loyalty members and mutual trust (mutual trust in group). Model financial institutions the right pattern of Grameen Bank is a form of cooperative (owned and affiliated members of the cluster). The working principle of Grameen Bank modified into AD/ART of cooperative. Cluster development is inseparable from the aspect chain upstream (input) – processing (industrial) and downstream (marketing) and involving cross-sector and private. Agricultural institutions preparing raw materials, facilitating the establishment of cooperative and capital stimulants. The Planning Board Institution designing the strengthening of institutions, management and technical skills of entrepreneurship.

Keywords: *Cluster, Model MFIs Working Principle of Grameen Bank.*

PENDAHULUAN

Penguatan struktur industri melalui konsep klaster dan pengembangan sentra UKM adalah kebijakan untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor. Sentra bertumpu pada produk, sedangkan klaster pada sistem bisnis hulu-hilir. Hasil evaluasi di Sulawesi Selatan pada 64 sentra agribisnis (2001-2004), bahwa sentra yang berjalan baik 20 unit (31,25%) dan yang mampu mengangsur pinjaman 10 sentra (15,63%). Hal ini, karena hilirisasi *core bisnis* klaster, kelembagaan sentra dan lembaga keuangan tidak berjalan optimal (Kemenkop dan UKM, 2011:1).

Sektor perbankan belum berperan optimal, karena tidak mau berbagi resiko guna membiayai kegiatan berskala kecil

(Kompas, 24 Februari 2012 : 20). Sehubungan dengan itu, diperlukan lembaga keuangan lain untuk penguatan modal klaster (membangun peran LKM). Model pembangunan melalui klaster, bertujuan untuk membangun wilayah secara utuh, berdaya saing dan berkelanjutan. Utuh, agar wilayah mempunyai *core bisnis* sebagai *leading sector* dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan yang mempunyai keterkaitan hulu - hilir.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) potensial sebagai kekuatan ekonomi domestik, bila dikembangkan akan mencetak wirausaha menengah yang tangguh. UMKM juga berperan sebagai katup penyelamat, mempertahankan

pertumbuhan dan menyerap tenaga kerja (Arifiandhi, Rheza, dkk, 2011:1-2). Namun, terkendala: (1) Akses pemasaran, karena kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk labil. (2) Lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, karena sumberdaya manusia dan modal, dan (3) Terbatasnya akses pada bank. Di Jawa Tengah, 70% UMKM belum tersentuh oleh perbankan komersial (Suara Merdeka, 21 Maret 2012). Artinya, bahwa sebagian besar UMKM dan usaha ekonomi "gurem" (sangat kecil modalnya), masih dilayani oleh LKM bukan bank atau penyedia pinjaman perorangan (*renternir*). Di samping itu, pada kelembagaan klaster terdapat kesenjangan antara pengurus dengan anggota. Anggota sebagai pelaku usaha ekonomi lemah, skala kecil, tidak mempunyai agunan, masih memerlukan uluran bantuan dari LKM: BPR, koperasi, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), LKM lain dan perorangan (Sriyanto, 2011: 7). Penelitian ini, mengkaji dimungkinkannya penerapan filosofi *Grameen Bank* yang dimodifikasi dengan LKM yang telah berkembang di daerah klaster.

Permasalahannya, bahwa pengembangan klaster dipengaruhi oleh produktivitas faktor produksi, di antaranya modal, karena perbankan tidak mau beresiko. Pertanyaan penelitiannya: (1) Bagaimana karakteristik pengurus dan anggota dalam kelembagaan klaster? (2) Bagaimana struktur kegiatan dan kebutuhan modal? (3) Sejauh mana peran lembaga keuangan setempat? dan (3) Bagaimana model LKM pola *Grameen Bank* berperan pada klaster? **Tujuan** yang akan dicapai: (1) Mendeskripsikan karakteristik pengurus dan anggota klaster; (2) Mengidentifikasi struktur kegiatan dan kebutuhan modal; (3) Menganalisis peran lembaga keuangan serta faktor yang mempengaruhi pelayanan, dan (4) Menyusun model LKM pola *Grameen Bank* bagi pengembangan klaster. **Manfaatnya**: bagi forum lembaga klaster

berfungsi sebagai evaluasi internal dan masukan kebijakan dalam membangun ekonomi wilayah berbasis klaster bagi pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat terapan guna memecahkan masalah dari subjek yang diteliti. Klaster mempunyai variasi dan heterogen, karakteristiknya tidak dapat digeneralisasi secara universal. Dua lokasi dipilih (dari 35 klaster binaan Balitbang), yakni daerah pantai (Kabupaten Brebes, klaster agroindustri) dan di wilayah dataran (Kota Surakarta, klaster industri batik). Partisipan dipilih secara *purposive* dari anggota klaster dan dilanjutkan *snow bolling* yang direkomendasikan partisipan sebelumnya. Pengumpulan data: Survei lapangan dan *Focus Group Discusion* dengan aparatur, tokoh kunci dan pemerhati klaster. Analisis data secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada textual data dengan *verifikasi* kesimpulan sebagai rencana tindak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Pengurus dan Anggota Dalam Kelembagaan Klaster

1. Solidaritas Antar Anggota

Solidaritas antar anggota secara rerata sangat tinggi, 72,73%. Pada klaster batik Kota Surakarta, solidaritasnya lebih tinggi 87,50%, sedangkan di Brebes yang menyatakan tinggi, rendah dan sangat rendah sama (33,33%). Data ini menunjukkan, bahwa dinamika pengurus dan anggota klaster di Surakarta lebih dinamis dan di Brebes memberikan pernyataan yang relatif ragu dengan pernyataan yang sama. Artinya, pengurus dan anggotanya belum komit, sehingga perlu dimotivasi dan pendampingan dari institusi lain (SKPD, akademisi, LSM).

Tabel 4.1. Solidaritas Antar Anggota (%).

No	Lokasi	Solidaritas antar Anggota			
		Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Surakarta	-	12.50	87.50	-
2	Brebes	33.33	33.33	33.33	-
	Rerata	9.09	18.18	72.73	-

Sumber: Data primer, diolah.

2. Loyalitas Anggota Terhadap Komunitas Klaster

Loyalitas anggota secara rerata menunjukkan tingkat yang tinggi, 81,82%, bahkan di Kota Surakarta mencapai 100%. Sedangkan di Brebes, yang menyatakan rendah 66,67%, dan yang menyatakan tinggi 33,33%. Loyalitas anggota terhadap klaster yang tinggi, mudah termotivasi untuk maju. Data ini konsisten dengan

tingkat solidaritas terhadap sesama anggota. Secara hipotetis, bahwa di kalangan masyarakat yang keras (nelayan), semestinya mempunyai solidaritas dan loyalitas yang tinggi, namun dalam pengurus ternyata memberikan pernyataan berbanding terbalik. Hal ini perlu ditelusuri lebih mendalam unsur modal sosial dan faktor penyebabnya.

Tabel 4.2. Loyalitas Anggota Terhadap Klaster (%).

No	Lokasi	Loyalitas Anggota Terhadap Klaster			
		Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Surakarta	-	-	100.00	-
2	Brebes	-	66.67	33.33	-
	Rerata	-	18.18	81.82	-

Sumber: Data primer, diolah.

3. Peran Anggota Dalam Melaksanakan Keputusan

Perilaku anggota yang menyatakan melaksanakan keputusan secara rerata tinggi, 72,73%. Pada klaster batik

Surakarta, yang menyatakan tinggi 75,00%, dan di Brebes 66,67%. Hal ini berarti, bahwa anggota mempunyai komitmen dan harapan yang lebih baik terhadap eksistensi klaster.

Tabel 4.3. Peran Anggota Dalam Melaksanakan Keputusan (%).

No	Lokasi	Melaksanakan Keputusan			
		sangat rendah	rendah	tinggi	sangat tinggi
1	Surakarta	-	25.00	75.00	-
2	Brebes	-	33.33	66.67	-
	Rerata	-	27.27	72.73	-

Sumber: Data primer, diolah.

4. Kepercayaan Anggota Terhadap Pengurus

Kepercayaan anggota kepada pengurus secara rerata 63,64% (tinggi).

Pada klaster batik Surakarta, pandangan pengurus klaster mengenai kepercayaan anggota terhadap pengurus yang menyatakan tinggi 75,00%. Pada klaster rumput laut di Brebes, pandangan pengurus mengenai kepercayaan anggota pada pengurus yang menyatakan rendah,

66,67%, sedangkan yang menyatakan tinggi 33,33%. Fakta ini menggambarkan bahwa antara anggota klaster dan pengurus maupun antar anggota klaster di Brebes masih terdapat masalah kepercayaan antar anggota kelompok dan pengurusnya (*mutual trust in group*).

Tabel 4.4. Kepercayaan Terhadap Pengurus (%).

No	Lokasi	Kepercayaan Terhadap Pengurus			
		Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Surakarta	-	12.50	75.00	12.50
2	Brebes	-	66.67	33.33	-
	Rerata	-	27.27	63.64	9.09

Sumber: Data primer, diolah.

Struktur Kegiatan Usaha dan Kebutuhan Modal

1. Struktur Kegiatan Usaha

Struktur kegiatan klaster tercermin pada jenis usaha yang menggambarkan rantai kegiatan hulu-hilir *core bisnis* (kegiatan utama). Pada klaster bisnis,

berbagai kegiatan berbeda, namun saling mendukung dan menguntungkan. Hilirisasi rantai kegiatan tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah, namun juga meningkatkan perluasan berusaha, kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal.

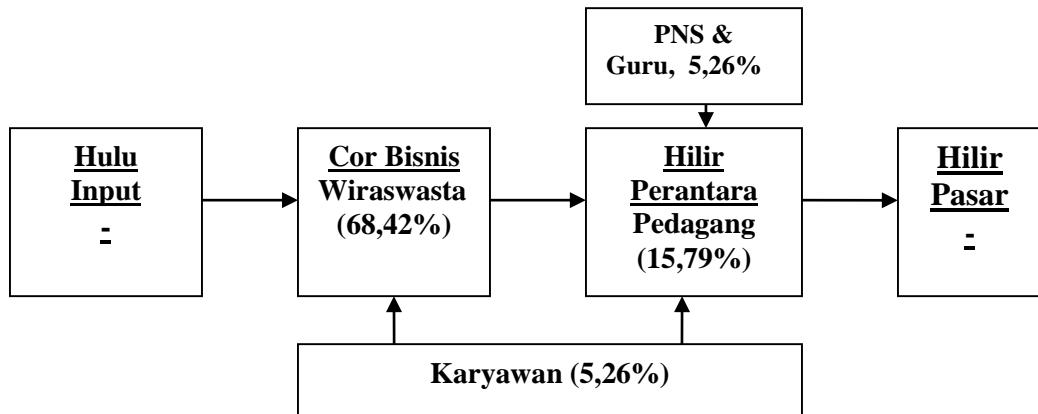
Tabel 4.5. Anggota Klaster Menurut Pekerjaan Utama (%).

No	Lokasi	Pekerjaan Utama							
		PNS	Guru	Wira swasta	Karya wan	Petani Tambak	Peda gang	Usaha Olahan RL	Buruh Rumput Laut
1	Surakarta	5,26	5,26	68,42	5,26	-	15,79	-	-
2	Brebes	12,50	-	20,83	-	29,17	20,83	4,17	12,50
	Rerata	9,30	2,33	41,86	2,33	16,28	18,60	2,33	6,98

Sumber: Data primer, diolah.

Di Kota Surakarta, sebagian besar pekerjaan utamanya berwiraswasta 68,42%, pedagang 15,79%, PNS, guru dan karyawan masing-masing 5,26%. Fakta ini, menunjukkan rantai dan struktur kegiatan tidak linier hulu-hilir. Bagan 4.1: (1) Anggota yang menekuni pekerjaan utama

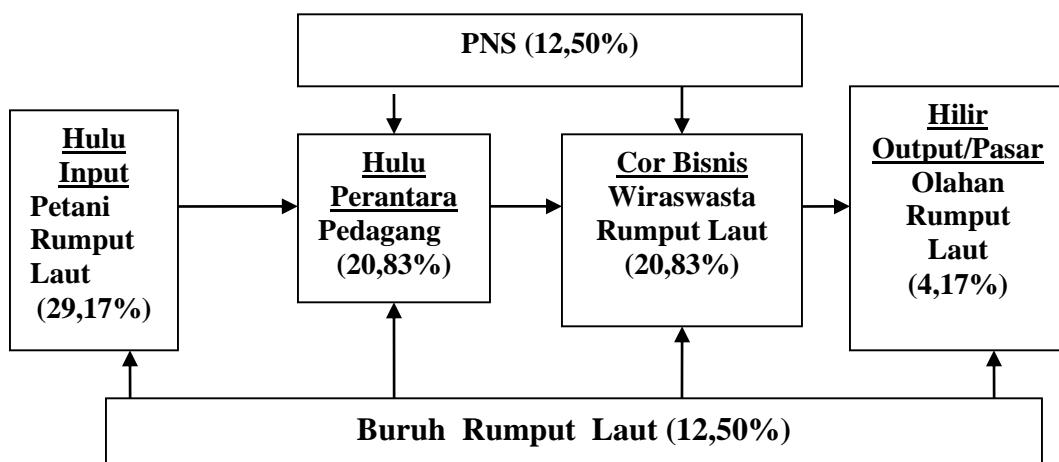
core bisnis 89,47% (wiraswasta, karyawan, dan pedagang), dan 10,53% (PNS dan Guru). (2) Secara individual didominasi wiraswasta (68,42%), dan (3) Kegiatan penunjang berkembang (pedagang berbagai jenis barang dan jasa) 15,79%.



Bagan 4.1. Rantai Kegiatan Anggota Klaster Batik Kota Surakarta.

Kegiatan hulu-hilir heterogen konvergen, menyebar sesuai dengan potensi pasar. Kegiatan penunjang berkembang, karena sebagai daerah wisata (budaya dan seni). Struktur kegiatan yang tidak linier hulu-hilir, termasuk kategori "Klaster

Bisnis". Artinya, di lokasi batik terdapat sekelompok usaha yang memiliki bisnis berbeda (batik, barang souvenir, warung makan dan jasa), tetapi memiliki aktivitas saling menunjang, bersinergi saling menguntungkan (Bagan 4.1).



Bagan 4.2. Rantai Kegiatan Anggota Klaster Rumput Laut Kabupaten Brebes.

Di Brebes, sebagian besar pekerjaan utamanya petani tambak, 29,17%, wiraswasta dan pedagang 20,83%, PNS dan buruh masing-masing 12,50%. Usaha makanan minuman dari rumput laut 4,17%. Artinya: (1) Pekerjaan utama selaras *core* bisnis 87,40% (petani tambak/pembudidaya 29,17%; wiraswasta 20,83%; pedagang 20,83%; buruh rumput laut 12,50%; mengolah rumput laut 4,17%), dan sisanya

12,60% PNS. (2) Struktur kegiatan mencerminkan rangkaian kegiatan hulu-hilir. Distribusi % tase pelaku usaha relatif merata. (3) Anggota klaster yang mengolah rumput laut relatif kecil (4,17%), kegiatan hilirnya belum optimal, sehingga perlu peningkatan produktivitas, kualitas, ketrampilan pengolahan pasca panen (hilirisasi) menuju pohon industri rumput laut : barang farmasi (shampo, pasta gigi,

sabun), industri (cat, pakan ternak dan pakan ikan) dan industri makanan dan minuman (*Soft Drink, Ice Cream, Jam, Roti*).

2. Kebutuhan dan Sumber Modal

Modal yang diperlukan dalam bentuk uang, sebagai modal kerja (membeli atau membuat barang dagangan) dan membiayai kegiatan operasional, bukan investasi (bangunan dan peralatan). Sumber modal dari diri sendiri (internal) maupun dari eksternal (bank dan non bank). Kebutuhannya selaras dengan volume

kegiatan dan harga barang serta biaya operasionalnya. Kebutuhan modal di Surakarta, pada skala di bawah Rp 5 juta, 84,21% dan di atas Rp 5 juta 15,79% dan di Brebes, kebutuhan modal di bawah Rp 5 juta 87,50% dan di atas Rp 5 juta 12,50%.

Sumber modal di Surakarta yang terbanyak dari modal sendiri 57,89%, dari koperasi dan bank 15,79% dan dari pegadaian 10,53%. Di Kabupaten Brebes, sumber modal yang terbanyak juga modal sendiri 66,67%, dari bank dan UPK PNPM 12,50%, dan dari LKM lain 8,33%.

Tabel 4.6 Kebutuhan Modal Kerja dan Sumber Modal Anggota Klaster (%).

No	Lokasi	Kebutuhan Modal Kerja (Rp)				Sumber Modal					
		<1 jt	1-2,9Jt	3-5 Jt	>5 jt	Modal Sendiri	Koperasi	Pegadaian	Bank	UPK PNPM	LKM
1	Surakarta	31,58	42,11	10,53	15,79	57,89	15,79	10,53	15,79	-	-
2	Brebes	25,00	45,83	16,67	12,50	66,67	-	-	12,50	12,50	8,33
	Rerata	27,91	44,19	13,95	13,95	62,79	6,98	4,65	13,95	6,98	4,65

Sumber: Data primer, diolah.

Fakta ini, menggambarkan bahwa : (1) Skala kegiatan ekonomi masih relatif kecil, sebagian besar masih dipenuhi dari internal dengan skala relatif kecil. Kebutuhan modal di bawah Rp 3 juta di Surakarta 73,69% dan di Brebes 70,83%. Pemenuhan modal di Surakarta 57,89% (koperasi, pegadaian dan bank) dan di Brebes 66,67% (BRI Unit, dan UPK PNPM). (2) Pemenuhan modal dari eksternal, khususnya dari bank komersial dilakukan oleh anggota klaster tertentu (kategori wiraswasta) yang *bankable* dengan kebutuhan modal relatif lebih besar.

3. Permasalahan Mengakses Permodalan

Permasalahan dalam mengakses pada lembaga keuangan dihadapkan pada agunan 73,68%, prosedur lama 15,79%, dan tidak tahu prosedur 10,53% (Kota Surakarta), dan di Kabupaten Brebes, yang menyatakan tidak mempunyai agunan 79,17%, prosedur lama 16,67%, dan alasan lainnya 4,17%. Upaya pemerintah, lembaga swasta dan juga keagamaan adalah dengan mendirikan LKM. Pinjaman melalui pendekatan kelompok (*group lending*), seperti model kemitraan atau klaster. Pola pinjaman kelompok dengan mekanisme jaminan kelompok (*joint liability*).

Tabel 4.7. Permasalahan Mengakses Lembaga Keuangan (%).

No	Lokasi	Permasalahan		
		Prosedur lama	Tidak ada jaminan	Lainnya
1	Surakarta	15,79	73,68	10,53
2	Brebes	16,67	79,17	4,17
	Rerata	16,28	76,74	6,98

Sumber: Data primer yang diolah.

Peran Lembaga Keuangan Setempat

Keberadaan lembaga keuangan formal dan non formal di kedua lokasi klaster sangat berbeda. Klaster batik di Surakarta terletak di tengah kota, sehingga tersedia fasilitas berbagai lembaga keuangan formal, sedangkan klaster di Brebes berlokasi di wilayah pantai, jauh dari berbagai fasilitas lembaga keuangan maupun jasa lainnya. Di wilayah klaster batik, terdapat lembaga keuangan formal, (bank komersial skala besar, pegadaian dan koperasi). Koperasi di tingkat kelurahan telah lama berdiri menjadi milik warga, bukan diperuntukan secara khusus bagi klaster dan untuk membantu penyediaan modal klaster, dirintis lembaga keuangan model Syariah. Di samping itu, terdapat juga UPK PNPM Mandiri Perkotaan dan LKM tingkat RW (Rukun Warga) yang modalnya dari APBD Kota Surakarta sebagai embrio BUMM (Badan Usaha Milik Masyarakat). BUMM seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai lembaga ekonomi di tingkat Desa di Kabupaten yang rancang Kementerian Dalam Negeri tahun 2009. Sedangkan, di Brebes beroperasi, Bank BRI Unit di tingkat kecamatan, UPK PNPM Mandiri Pedesaan yang dimanfaatkan anggota klaster.

Peran lembaga keuangan formal dan non formal di kedua lokasi tersebut bersifat pasif. Hal ini, karena sifat lembaga tersebut melayani seluruh masyarakat. Di samping itu, pola kerjanya baru sebagai: layanan keuangan (deposito, simpan pinjam, jasa pembayaran), dan belum komprehensif

sebagai layanan pemasaran, intermediasi sosial kemasyarakatan dan *entrepreneur* bagi nasabahnya.

Faktor Keberhasilan Model Kelompok

Keberhasilan model kelompok (klaster) untuk membangun ekonomi wilayah ditentukan oleh faktor internal dan eksternal, yakni: (a) Pengurus yang kober, pintar, bener dan pener (peduli, pandai dan profesional, tepat, jujur), penguatan kelembagaan dan pendampingan. (b) Anggota kelompok yang: Solider dan loyal kepada kelompok; Partisipatif dalam proses pengambilan keputusan; Komit menjalankan keputusan kelompok; dan Saling percaya dan dapat dipercaya, jujur (*mutual trust in group*). (c) Penguatan kelembagaan permodalan, LKM dan bank dengan peran sebagai: layanan keuangan, layanan pemasaran, intermediasi sosial kemasyarakatan dan *entrepreneur*. (d) Pendampingan yang berkesinambungan untuk membantu penelitian pasar, pelatihan, pembinaan dan *supervisi*.

Sikap dan perilaku anggota yang sering terjadi adalah egoisme personal dan komitmen antara kepentingan kelompok yang sering berseberangan dengan kepentingan keluarga. Permasalahan utama bank dalam mengelola kelompok, bahwa: kemampuan bank memahami karakter debitur rendah, resiko pembiayaan debitur tinggi, debitur tidak mempunyai agunan, nilai investasi UMKM kecil. Sedangkan, kendala pada kelompok: kesulitan mencari figur ketua kelompok yang mampu memimpin; pembentukan kelompok yang

dipaksakan, tidak partisipatif; penyalahgunaan wewenang pengurus (*moral hazard*); loyalitas anggota terhadap kelompok; dan penyimpangan penggunaan kredit.

Model LKM Pola Grameen Bank

Model adalah pola atau acuan yang dibuat untuk diujicobakan dan dikembangkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:589). Model LKM yang mengadopsi Grameen Bank secara utuh, tidaklah sesuai dengan regulasi dan kondisi masyarakat klaster. Penyesuaian landasan hukum, modifikasi dari aspek teknis dan modal sosial di lingkungan klaster (kultural dan struktural), sangat diperlukan. Garis besar kerangkanya sebagai berikut:

1. **Payung hukum**, berafiliasi pilihan peraturan LKM berbentuk: (a) *Bank*, seperti BPR (Bank Perkreditan Rakyat), mengacu pada Undang-Undang Perbankan, di bawah Bank Indonesia. (b) Koperasi, seperti koperasi simpan-pinjam, dengan payung hukum Undang-Undang Koperasi, di bawah Kemeneg. Koperasi dan UKM. (c) Modal *Ventura*, mengacu Kepres. R.I, di bawah BAPEPAM-LK, atau (d) BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Berlandaskan hal di atas, LKM yang tepat untuk komunitas anggota klaster adalah berbentuk "**Koperasi**" (Klaster), karena koperasi adalah milik anggota (anggota klaster), modal dari anggota dan pihak lain (pemerintah dan CSR).
2. **Prinsip Dasar**, memperhatikan: (a) Sasaran utama anggota klaster. (b) Pendekatan kelompok solidaritas (saling membantu, menguatkan, kebersamaan usaha dan tanggung jawab bersama). (c) Anggota wajib mengikuti "Wajib Latihan Kumpulan". (d) Transaksi (pinjaman, angsuran dan pembinaan) serta penguatan modal sosial dilakukan pada pertemuan mingguan. (e) Syarat dan prosedur mudah dihapami, mudah dilaksanakan dan cepat. (f) Pinjaman tanpa agunan, bunga ringan. (f) Wajib menyimpan simpanan wajib, simpanan pokok, dana darurat (asuransi) dan tabungan sukarela. (g) Pinjaman awal dengan skala kecil dan berkelanjutan sesuai prestasi angsuran. (h) Dimungkinkan ada penjadwalan ulang (percepatan atau perpanjangan periode angsuran), dan (i) Berkomitmen menjadi anggota koperasi. Prinsip dasar di atas perlu diadopsi dan disesuaikan pada penyusunan materi AD/ART Koperasi (Klaster).
3. **Produk dan Sasaran**, adalah penguatan modal anggota klaster, dengan sasaran: (a) Memberdayakan anggota klaster yang mempunyai usaha produktif skala kecil (UMKM). Pemberdayaan dengan pengembangan kapasitas usaha (penyehatan manajemen, kelembagaan, peningkatan profesionalisme, penyertaan modal dan penerapan teknologi informasi). (b) Layanan pembiayaan (pinjaman dan simpanan). (c) Memutus ketergantungan anggota klaster terhadap pelepas uang perorangan (*informal money lenders*). (d) Meningkatkan kemandirian. (e) Meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga anggota klaster.
4. **Mekanisme Pembentukan** kelembagaan dan membangun modal sosial, dilakukan melalui pentahapan, yakni: (1) Survei Lokasi; (2) Pertemuan Umum; (3) Uji Kelayakan; (4) Latihan Wajib Kumpulan dan Ujian Pengesahan Kumpulan; (5) Pembentukan Rembug Pusat, dan (6) Aktivitas Mingguan.
5. **Permodalan dan Penggunaan Laba Bersih**, Sebagai tanggung jawab anggota, modal awal wajib berasal dari anggota (simpanan pokok, simpanan

wajib, simpanan sukarela). Di samping itu, perlu dibicarakan simpanan investasi, dana darurat dan penyertaan modal. Modal dari anggota (sebagai tanggung jawab dan kemandirian anggota). Penyertaan modal dari pemerintah daerah dengan pengembalian berupa pendapatan asli daerah (PAD). Dana darurat sebagai dana cadangan, asuransi (tunggakan, kegiatan sosial solidaritas). Sebagai contoh Koperasi Kredit PELITA USAHA di Temanggung dengan ketentuan: (a) Pendaftaran Rp.10.000,- (b) Simpanan Pokok Rp 500.000,- (c) Biaya Pendidikan Rp 10.000,- (d) Iuran Gedung Rp 10.000,- (e) Dana Solidaritas Rp 25.000,- (f) Simpanan Wajib Rp 20.000,- - Rp.60.000,- (dipilih). Pemanfaatan laba bersih : (1) Pemilik Saham 50%; (2) Cadangan Umum 15%; (3) Cadangan Tujuan 15% (4) Dana kesejahteraan 10 %; dan (5) Jasa produksi 10%. Semua ketentuan ini perlu dibahas dan dicantumkan pada AD/ART koperasi.

6. **Pengembangan dan Pengendalian,** terkait dengan kegiatan ekonomi produktif anggota klaster tidak terlepas dari aspek teknis rantai kegiatan hulu (input) – prosesing (industri) – hilir (pemasaran). Dengan demikian, arah pengembangan dan pengendalian berorientasi pada rantai kegiatannya, yakni: (a) Rantai kegiatan hulu, berfokus pada faktor input, (peran SKPD sektor hulu bahan baku). (b) *Prosesing*, untuk memperpanjang rantai kegiatan dan rantai nilai. Hilirisasi *core bisnis*, berorientasi pada pohon industri yang belum ditangani dan peluang pasar (SKPD yang berperan bidang industri), dan (c) Rantai kegiatan hilir, berfokus pada rantai pemasaran. Kata kuncinya daya saing yang meliputi produktivitas, kualitas, harga, kontinuitas dan skala produksi. SKPD yang berperan bidang

perdagangan bekerjasama dengan KADIN setempat. Di samping aspek teknis, aspek pemupukan modal (pelayanan keuangan) dan pengembangan visioner ke depan oleh SKPD bidang koperasi dan bagian perekonomian, sedangan *grant desain dan roadmap* klaster oleh FEDEP dan Bappeda.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Karakteristik pengurus dan anggota klaster variatif yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial budaya setempat. Kelembagaan klaster di Surakarta lebih dinamis, sedangkan di Brebes diperlukan motivasi dan pendampingan untuk mengembangkan produk hilir.
2. Struktur kegiatan klaster di Surakarta heterogen dan berkembang kegiatan penunjang, sedangkan di Brebes berstruktur klaster linear hulu-hilir, dengan kegiatan hilir masih sangat terbatas pada jenis makanan dan minuman rumput laut. Modal lebih banyak dicukupi dari diri sendiri dan sebagian kecil dipenuhi dari lembaga keuangan nonbank. Besaran kebutuhan modal di bawah Rp 5 juta mencapai 70% pada dua lokasi.
3. Lembaga keuangan setempat, bank dan non bank berperan memberikan pelayanan kepada semua anggota masyarakat sebagai nasabah. PNPM Mandiri Perkotaan dan Pedesaan serta BRI Unit di Kecamatan adalah lembaga keuangan yang terdekat dan memberikan pelayanan kebutuhan modal. Lembaga keuangan khusus milik anggota klaster (Usaha Bersama atau Koperasi) belum terbentuk.
4. Model lembaga keuangan dengan pola *Grameen Bank* perlu dimodifikasi sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat. Bentuk lembaga

keuangan yang tepat adalah Koperasi, karena koperasi milik dan berafiliasi pada anggota (anggota klaster). AD/ART perlu disesuaikan dengan prinsip pola kerja *Grameen Bank*. Klaster sebagai wadah kelompok, keberhasilannya tergantung komitmen pengurus dan anggotanya, serta pendampingan SKPD terkait.

Rekomendasi

1. Klaster batik di Kota Surakarta, diperlukan peran: (a) SKPD koperasi memberikan fasilitasi pendirian koperasi dengan AD/ART disesuaikan dengan tahapan yang diadopsi dari pola *Grameen Bank*. (b) Pengurus klaster/forum rembug klaster berinisiatif untuk berkonsultasi kepada SKPD koperasi dalam proses pendirian koperasi, dan (c) Bappeda (FEDEP) memprogramkan penguatan kelembagaan, permodalan, pelatihan manajemen dan ketrampilan kewirausahaan.
2. Klaster rumput laut di Brebes, memerlukan peran: (a) Bappeda (FEDEP) memberikan motivasi dan penguatan anggota, pengurus dan kelembagaan klaster. (b) SKPD perikanan memberikan pelatihan budidaya rumput laut untuk peningkatan kualitas, produktivitas dan kontinuitas ketersediaan hasil panen. (c) SKPD perindustrian memberikan pelatihan paska panen pengolahan rumput laut untuk proses hilirisasi sesuai arah pohon industrinya, dan (d) SKPD koperasi menginisiasi pembentukan lembaga keuangan pra koperasi untuk anggota klaster.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. *Grameen Bank*. http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama.
- Arifiandhi, Rheza. dkk, 2011. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional*. Jurnal Ekonomi Koperasi, [http://vahmy76.wordpress.Com/2011/12/19/jurnalekonomikoperasi-6](http://vahmy76.wordpress.com/2011/12/19/jurnalekonomikoperasi-6).
- Arikunto, Suharsimi 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2012. *Perbankan Republik Indonesia Tidak Rasional: Pasar Keuangan Masih Dangkal*. Kompas 24 Pebruari 2012.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Perindustrian Republik Indonesia, 2009. *Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri Kecil dan Menengah Tertentu Tahun 2010-2014*. Departemen Perindustrian, Jakarta.
- Hermana, B. dkk 2004. *Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Gunadarma University, Jakarta.
- Galeriukm, 2010. *Mengenal Macam-macam Modal Usaha*. <http://galeriukm.web.id>
- Gubernur Jawa Tengah, 2012. *Peluncuran Apex BPR Bank Jateng*. Suara Merdeka, Semarang.
- Kementerian Keuangan RI, 2009. *SKB Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia* (SKB Nomor : 351.1/KMK.010/2009; 900-639A Th 2009; 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; 11/43A/KEP.6BI/2009 tentang Strategi Pengembangan LKM). Bank Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2011. *Kajian Efektivitas Model Penumbuhan Klaster Bisnis UKM Berbasis Agribisnis*. www.smeada.com/.../...
- Kompas, 2012. *Analisis Peran Perbankan*. Bank Indonesia, Jakarta.
- Menteri Perindustrian Republik Indonesia, 2009. *Peta Panduan (Road map) Pengembangan Klaster Industri Prioritas Industri Kecil dan Menengah Tertentu Tahun 2010-2014*. Departemen Perindustrian Jakarta, 2009.
- Miles, Mattew B, & Huberman, A Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rosidi. UI Press, Jakarta
- Mustafa, Zainal, EQ, 2009. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Graha Ilmu, Yogayakarta.
- Nurcahyo, 2007, *Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah*. <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8664-peran-lembaga-keuangan>.
- Pemerintah Kelurahan Laweyan, 2009. *Profil Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta*. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan, Surakarta.
- Syarif, Teuku, 2006. *Grameen Bank Membuktikan Perempuan dan Orang Termiskin dari yang Miskin Mempunyai Potensi Untuk*

- Diperdayakan.* Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta.
- Senduk, Safir, 2010. *Perencanaan Keuangan.* <http://www.perencanaankeuangan.com>
- Sriyanto, 2011. *Model Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat.* Lembah Manah, Yogyakarta.
- Sulistiyono, 2009. *Sumber Modal dalam Manajemen Keuangan.* <http://ilmumanajemen.ordpress.com/2009/01/17/sumber-modal/>